

KOMPETENSI KADER MOTEKAR SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA

Viena Rusmiati Hasanah^{1*)}, Wita Fricilia L Gaol²⁾, Nike Kamarubiani³⁾

¹ Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

³ Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*)Corresponding author: viena@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mendampingi keluarga rentan. Meskipun Motekar memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan di tingkat komunitas, implementasi perannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi kader Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat serta implikasinya terhadap penguatan ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kelurahan Babakan, Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi partisipatif terhadap kader Motekar, keluarga, dan pemangku kepentingan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada kerangka kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader Motekar memiliki kompetensi kuat pada aspek *relasional-sosial* dan *edukatif-transformasional*, terutama dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi pembelajaran masyarakat, dan meningkatkan kesadaran keluarga. Namun, kompetensi *teknis-inovatif* dan *struktural-advokatif* masih belum optimal, khususnya dalam perencanaan berbasis data, pengelolaan konflik kompleks, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi Motekar terhadap ketahanan keluarga lebih dominan pada dimensi sosial-psikologis dan legalitas keluarga, sementara dimensi ekonomi dan kapasitas dalam pengembangan jejaring dan advokasi komunitas masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kader berbasis standar kompetensi untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan.

Kata kunci: Agen Perubahan, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Keluarga, Keluarga Rentan, Motekar

Abstract

This study is motivated by the important role of Family Resilience Motivator Cadres (Kader Motivator Ketahanan Keluarga or Motekar) as community empowerment facilitators in assisting vulnerable families. Although Motekar holds a strategic position as a change agent at the community level, the implementation of its role continues to face various challenges. This study aims to analyze the competencies of Motekar cadres as community empowerment facilitators and their implications for strengthening family resilience. A qualitative approach with a case study design was employed in

Babakan Urban Village, Bandung City. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and participatory observation involving Motekar cadres, families, and stakeholders. The data were analyzed using thematic analysis, guided by the competency framework for community empowerment facilitators. The findings show that Motekar cadres demonstrate strong competencies in relational-social and educational-transformational aspects, particularly in building trust, facilitating community learning, and raising family awareness. However, technical-innovative and structural-advocacy competencies remain less optimal, especially in data-based planning, complex conflict management, cadre regeneration, and institutional strengthening. The findings also indicate that Motekar's contribution to family resilience is more dominant in the social-psychological and family legality dimensions, while its contribution to economic resilience and its capacity to develop networks and community advocacy remain limited. This study emphasizes the importance of strengthening cadre capacity based on competency standards to improve the effectiveness of sustainable family empowerment.

Keywords: *Agent of Change, Community Empowerment Facilitator, Family Resilience, Motekar, Vulnerable Families.*

Pendahuluan

Keluarga rentan merupakan kelompok sosial yang menghadapi tekanan ekonomi, sosial, psikologis, dan kelembagaan yang dapat menghambat keberfungsian keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Persoalan seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, lemahnya pengasuhan, rendahnya literasi administrasi keluarga, serta keterbatasan akses terhadap layanan sosial menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal keluarga, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit ketika menghadapi tekanan, krisis, maupun perubahan sosial yang memengaruhi keberfungsian keluarga. (Walsh, 2006) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mencakup pola keyakinan, komunikasi, dukungan emosional, dan kemampuan keluarga dalam mengorganisasi sumber daya. (Sunarti, 2001, 2013) menekankan bahwa ketahanan keluarga mencakup dimensi fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga berhubungan erat dengan dukungan sosial, komunikasi keluarga, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan keluarga dalam mengelola tekanan (Cheng et al., 2024b; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024; Zhang et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi agenda penting dalam pembangunan sosial berbasis komunitas.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, keluarga merupakan unit sosial dasar yang menentukan kualitas kehidupan komunitas. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses strategis untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah, mengakses sumber daya, mengambil keputusan, serta mengelola kehidupannya secara lebih mandiri. Dalam perspektif pendidikan kritis, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses penyadaran kritis (*conscientization*) yang memungkinkan masyarakat memahami struktur persoalan yang dihadapi dan terlibat aktif dalam perubahan sosial (Freire, 1970). Pemberdayaan juga berlangsung pada level mikro, mezzo, dan makro. Level mikro berfokus pada individu dan keluarga, level mezzo pada kelompok dan komunitas, sedangkan level makro berkaitan dengan struktur sosial, kebijakan, dan sistem kelembagaan yang memengaruhi kehidupan masyarakat (Parsons, et.al, 1994). Dalam konteks pendidikan orang dewasa, prinsip andragogi

menekankan bahwa proses belajar harus berbasis pengalaman, kebutuhan nyata, dialog, dan pemecahan masalah (Knowles, 1980). Sejalan dengan itu, (Ife, 2016) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berbasis partisipasi, penguatan kapasitas lokal, dan penghargaan terhadap pengalaman masyarakat. Dengan demikian, pendampingan keluarga rentan perlu menempatkan keluarga sebagai subjek aktif dalam proses perubahan, bukan sekadar penerima layanan.

Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) merupakan salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Motekar berperan sebagai pendamping, motivator, mediator, edukator, dan fasilitator bagi keluarga rentan agar mampu mengenali masalah, mengakses sumber daya, serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga. Studi (Purnama & Andriani, 2022) menunjukkan bahwa Program Motekar berkontribusi dalam menekan angka perceraian melalui pendampingan keluarga, sedangkan (Rahma et al., 2023) menegaskan bahwa Motekar merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang memerlukan integrasi peran pada level individu, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, Motekar dapat dipahami sebagai aktor lokal yang menjembatani kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks pembangunan masyarakat, keberadaan aktor lokal seperti Motekar menjadi penting karena pemberdayaan keluarga tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi membutuhkan kehadiran fasilitator yang mampu membangun relasi sosial, memahami konteks komunitas, serta menggerakkan partisipasi warga.

Fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mendorong transformasi sosial melalui komunikasi, pembelajaran, partisipasi, mediasi, advokasi, dan penguatan jejaring sosial. Konsep *change agent* merujuk pada individu atau kelompok yang berperan memperkenalkan gagasan baru, memfasilitasi proses perubahan, serta membantu masyarakat mengadopsi perilaku atau praktik yang lebih adaptif (Rogers, 2003). Dalam praktik pemberdayaan, fasilitator tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola dinamika kelompok, memfasilitasi pembelajaran masyarakat, serta menghubungkan warga dengan sumber daya dan pemangku kepentingan. (Laverack, 2006) menegaskan bahwa fasilitator pemberdayaan perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, mendorong perencanaan partisipatif, membangun jaringan, dan memperkuat kapasitas komunitas. Studi (Costea et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan dapat memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan efikasi diri dalam mendukung implementasi program. Sejalan dengan itu, (Ahmed et al., 2025) menekankan bahwa pendekatan komunitas yang partisipatif dan berbasis budaya dapat memperkuat keterampilan hidup, kepemimpinan, dan kapasitas kelompok rentan dalam menghadapi determinan sosial. Dengan demikian, kompetensi fasilitator menjadi prasyarat penting agar proses pemberdayaan keluarga dapat berlangsung secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM). SKKNI FPM memberikan kerangka kompetensi yang mencakup kemampuan membangun relasi sosial, mengelola pembelajaran masyarakat, mengembangkan kemandirian, melakukan mediasi, advokasi, membangun jejaring, serta memperkuat kelembagaan komunitas (*Kepmenakertrans No. 81, 2012*). Kerangka ini relevan untuk menganalisis peran Motekar karena kader tidak hanya dituntut menjalankan fungsi

teknis-administratif, tetapi juga memfasilitasi proses pembelajaran keluarga, membangun kesadaran, menghubungkan keluarga dengan layanan, dan mendorong perubahan sosial di tingkat komunitas. Program pemberdayaan yang melibatkan fasilitator dapat memperkuat kemampuan keluarga dalam mengakses layanan, membangun relasi sosial, mengembangkan strategi pemecahan masalah, dan meningkatkan kemandirian (Cleek et al., 2012; Pan et al., 2025). Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai *outcome* dari proses pemberdayaan yang partisipatif, terencana, dan berkelanjutan.

Meskipun Motekar memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga, berbagai temuan menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah kader, luasnya wilayah dampingan, rendahnya sosialisasi program, belum meratanya kapasitas kader, serta belum adanya pelatihan lanjutan yang berkelanjutan menjadi tantangan dalam pelaksanaan peran Motekar di lapangan (Purnama & Andriani, 2022; Rahma et al., 2023). Selain itu, praktik fasilitasi yang dilakukan kader sering kali masih bersifat personal, situasional, dan berbasis pengalaman, sehingga belum sepenuhnya terstandarisasi dalam kerangka kompetensi profesional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan peran Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Kesenjangan ini penting dikaji karena keberhasilan pemberdayaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kapasitas kader dalam membangun relasi, memfasilitasi pembelajaran, melakukan mediasi, mengembangkan jejaring, dan memperkuat kelembagaan komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kompetensi Kader Motekar dengan standar kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan ketahanan keluarga. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana kesesuaian kompetensi kader Motekar dengan standar kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana kompetensi tersebut berkontribusi dalam membangun ketahanan keluarga? Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif pemberdayaan masyarakat dengan kerangka SKKNI Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 81 Tahun 2012 tentang jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam menganalisis praktik kader Motekar sebagai agen perubahan komunitas. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian pemberdayaan keluarga dan pengembangan masyarakat, serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi penguatan kapasitas kader yang lebih sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Tinjauan Pustaka

Ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi utama pembangunan sosial yang berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga memerlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas secara simultan (Sunarti, 2013; Sunarti, 2019). Dalam konteks tersebut, Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk intervensi berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian Purnama dan Andriani (2022) menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan

Motekar berkontribusi dalam memperkuat relasi keluarga dan menekan risiko perceraian, sementara Rahma et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas Motekar ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan fungsi edukasi, mediasi, motivasi, dan fasilitasi pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan program pemberdayaan keluarga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor lokal yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan publik serta mendorong partisipasi sosial secara berkelanjutan (Laverack, 2006; Rogers, 2003).

Literatur pemberdayaan masyarakat menempatkan fasilitator sebagai agen perubahan (change agent) yang berperan dalam membangun kapasitas masyarakat melalui proses pembelajaran, advokasi, mediasi, penguatan jejaring, dan pengorganisasian komunitas (Rogers, 2003; Laverack, 2006). Dalam konteks ini, peran Motekar dapat dipahami sebagai fasilitator pemberdayaan keluarga yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis, memperkuat kemampuan pemecahan masalah, serta menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber daya dan layanan yang tersedia. Pentingnya kompetensi fasilitator juga ditegaskan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup kemampuan membangun relasi sosial, mengelola pembelajaran masyarakat, melakukan mediasi dan advokasi, serta memperkuat kelembagaan komunitas (Kepmenakertrans No. 81 Tahun 2012). Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, efikasi diri, serta efektivitas implementasi program pemberdayaan (Costea et al., 2024; Ahmed et al., 2025). Selain itu, fasilitator yang kompeten terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akses keluarga terhadap layanan sosial, memperkuat dukungan sosial, membangun kemandirian, dan mendorong terciptanya ketahanan keluarga yang berkelanjutan (Cleek et al., 2012; Pan et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan kompetensi Motekar menjadi aspek strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan ketahanan keluarga berbasis komunitas

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik, pengalaman, peran, dan kompetensi Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Desain studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual, holistik, dan mendalam dalam situasi sosial yang nyata. Menurut (Yin, 2018), studi kasus relevan digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya terpisah. Dalam penelitian ini, praktik kader Motekar tidak dapat dipahami secara terlepas dari konteks sosial masyarakat, kelembagaan lokal, serta dinamika keluarga rentan yang menjadi sasaran pendampingan.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif partisipatif karena melibatkan berbagai aktor yang berkaitan langsung dengan program Motekar, yaitu kader Motekar, keluarga binaan, dan pemangku kepentingan. Pelibatan berbagai aktor tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program, kompetensi kader, tantangan lapangan, serta kontribusi Motekar terhadap penguatan ketahanan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan makna,

konteks, pengalaman subjektif, dan interaksi sosial dalam memahami suatu fenomena (Creswell, J. W., & Poth, 2018; Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah pelaksanaan pendampingan keluarga oleh kader Motekar yang memiliki kinerja terbaik di Kota Bandung serta memiliki dinamika sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sebagai institusi yang berkaitan dengan pembinaan dan penguatan program Motekar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif kader, keberadaan keluarga binaan, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas kader Motekar, keluarga binaan, dan pemangku kepentingan yang memahami pelaksanaan program Motekar. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif tidak menekankan jumlah partisipan yang besar, tetapi lebih mengutamakan kedalaman informasi dan relevansi pengalaman partisipan terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, J. W., & Poth, 2018).

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian

Kategori Partisipan	Jumlah	Kode Informan	Kriteria Partisipan	Peran dalam Penelitian
Kader Motekar	1 orang	M1	Kader aktif yang terlibat dalam pendampingan keluarga rentan	Memberikan informasi mengenai praktik pendampingan, kompetensi, tantangan, dan strategi fasilitasi
Keluarga binaan	4 orang	K1–K4	Keluarga yang pernah atau sedang menerima pendampingan dari kader Motekar	Memberikan pengalaman sebagai penerima manfaat program dan persepsi terhadap peran Motekar
Pemangku kepentingan	3 orang	S1–S3	Pihak yang memahami kebijakan, pembinaan, atau pelaksanaan program Motekar, termasuk unsur DP3AKB dan aktor lokal	Memberikan informasi mengenai dukungan kelembagaan, koordinasi program, serta evaluasi pelaksanaan Motekar
Peserta FGD	6–8 orang	FGD1–FGD8	Peserta yang berasal dari unsur kader, keluarga binaan, dan/atau aktor komunitas yang terlibat dalam program	Memberikan perspektif kolektif mengenai implementasi, manfaat, dan kendala program

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) kader Motekar yang aktif melakukan pendampingan keluarga; (2) keluarga yang pernah atau sedang menjadi binaan program Motekar; dan (3) pemangku kepentingan yang memahami program Motekar, baik dari unsur pemerintah, lembaga lokal, maupun aktor komunitas. Adapun kriteria eksklusi meliputi individu yang tidak terlibat langsung dalam program, tidak memiliki pengalaman relevan, atau tidak bersedia memberikan informasi dalam proses penelitian.

Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. *Tahap pertama* adalah identifikasi dan perumusan masalah, yaitu peneliti menelaah isu terkait kompetensi kader Motekar, praktik pemberdayaan keluarga, serta kesenjangan antara peran kader di lapangan dengan standar kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tahap ini menghasilkan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. *Tahap kedua* adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi partisipatif. Tahap ini bertujuan memperoleh data empiris dari berbagai sumber, baik dari kader Motekar, keluarga binaan, maupun pemangku kepentingan. *Tahap ketiga* adalah pengolahan dan pengkodean data, yaitu proses mengorganisasi data hasil wawancara, FGD, dan observasi ke dalam kategori awal yang relevan dengan fokus penelitian. *Tahap keempat* adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema utama, serta kesenjangan kompetensi kader. *Tahap kelima* adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna temuan penelitian serta menyusun rekomendasi penguatan kapasitas kader Motekar dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan observasi partisipatif. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan memperoleh data yang kaya, mendalam, dan memungkinkan triangulasi antar sumber maupun antar metode.

Pertama, wawancara mendalam dilakukan kepada kader Motekar, keluarga binaan, dan pemangku kepentingan. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, praktik pendampingan, tantangan, serta kontribusi Motekar dalam penguatan ketahanan keluarga. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini memungkinkan peneliti menjaga fokus penelitian, tetapi tetap memberi ruang bagi partisipan untuk menjelaskan pengalaman secara terbuka. Kedua, *FGD* dilakukan untuk menggali pandangan kolektif mengenai implementasi program Motekar, kompetensi kader, manfaat program, serta hambatan yang dihadapi di tingkat komunitas, melibatkan 6–8 peserta dan berlangsung sekitar 90–120 menit. Hal ini digunakan untuk memperoleh dinamika pandangan antar partisipan serta mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam pengalaman bersama.

Ketiga, observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan pendampingan atau aktivitas komunitas berlangsung, untuk mengamati secara langsung praktik fasilitasi kader Motekar, pola komunikasi dengan masyarakat, penggunaan ruang sosial komunitas, serta bentuk interaksi antara kader, keluarga binaan, dan aktor lokal. Observasi dilakukan selama kurang lebih 2–4 minggu. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, panduan FGD, lembar observasi, serta angket kompetensi FPM sebagai alat bantu untuk mengonfirmasi aspek kompetensi fasilitator.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, terutama terkait persetujuan partisipan, kerahasiaan data, perlindungan identitas, dan penghormatan terhadap hak partisipan. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, bentuk keterlibatan partisipan, manfaat penelitian, serta penggunaan data untuk kepentingan akademik. Partisipan juga diberi informasi bahwa keterlibatan mereka bersifat sukarela, memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu, dan dapat menghentikan partisipasinya kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.

Persetujuan partisipan diperoleh sebelum wawancara mendalam dan FGD dilakukan. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas partisipan disamarkan melalui penggunaan kode informan, seperti M untuk kader Motekar, K untuk keluarga binaan, S untuk pemangku kepentingan, dan FGD untuk peserta diskusi kelompok. Seluruh data hasil wawancara, FGD, dan observasi digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Apabila penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari lembaga tertentu, nomor persetujuan etik dapat dicantumkan pada bagian ini. Jika belum tersedia, peneliti perlu menegaskan bahwa prinsip persetujuan partisipan, kerahasiaan data, dan anonimitas informan telah diterapkan sesuai dengan kaidah penelitian sosial.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama yang berkaitan dengan kompetensi kader Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Analisis tematik dipilih karena sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menemukan pola makna dari data empiris yang diperoleh melalui wawancara, FGD, dan observasi. (Braun & Clarke, 2006) menjelaskan bahwa analisis tematik mencakup proses pengenalan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara bertahap melalui transkripsi data, pembacaan berulang, pengkodean awal, pengelompokan kode ke dalam kategori, pembentukan tema, dan interpretasi makna. Kerangka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) jabatan FPM digunakan sebagai lensa analisis deduktif untuk menilai kesesuaian kompetensi kader dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, tema-tema yang muncul dari wawancara, FGD, dan observasi digunakan secara induktif untuk memperkaya interpretasi terhadap praktik pemberdayaan di lapangan.

Dengan demikian, proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik deduktif-induktif. Analisis deduktif digunakan untuk membaca data berdasarkan unit kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat, seperti kemampuan membangun relasi sosial, mengelola pembelajaran masyarakat, melakukan mediasi, advokasi, dan membangun jejaring. Sementara itu, analisis induktif digunakan untuk menangkap temuan lapangan yang muncul dari pengalaman partisipan, seperti praktik komunikasi informal, penggunaan ruang sosial komunitas, keterbatasan kaderisasi, dan tantangan koordinasi kelembagaan. Analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menemukan pola kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan kompetensi.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria *trustworthiness* yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* sebagaimana dikembangkan oleh (Lincoln, Y. S., & Guba, 1985). *Credibility* dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari kader Motekar, keluarga binaan, dan pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan hasil wawancara, FGD, dan observasi. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mengonfirmasi hasil wawancara atau ringkasan temuan kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian makna.

Transferability dicapai dengan memberikan deskripsi konteks penelitian secara rinci, termasuk lokasi penelitian, karakteristik partisipan, dan konteks pelaksanaan program Motekar, sehingga pembaca dapat menilai keterterapan temuan pada konteks lain. *Dependability* dijaga melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, pengkodean, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Sementara itu, *confirmability* dilakukan dengan menjaga objektivitas peneliti melalui pencatatan jejak data (*audit trail*) dan refleksi peneliti untuk meminimalkan bias subjektif. Dengan demikian, kombinasi triangulasi, *member check*, dokumentasi proses penelitian, dan refleksi peneliti digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan konsistensi yang memadai.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dalam pemberdayaan keluarga rentan tidak hanya berlangsung melalui pelaksanaan tugas formal, tetapi juga melalui proses sosial yang bersifat relasional, edukatif, partisipatif, dan kontekstual. Motekar menjalankan fungsi sebagai pendamping, fasilitator, mediator, edukator, dan penghubung antara keluarga rentan dengan sumber daya komunitas maupun kelembagaan lokal. Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara, FGD, dan observasi, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu: Motekar sebagai fasilitator relasional dalam pemberdayaan keluarga, kompetensi edukatif dalam membangun kesadaran keluarga, kesenjangan kompetensi strategis dan kelembagaan, kontribusi Motekar terhadap ketahanan keluarga, serta Motekar sebagai agen perubahan komunitas.

a. Motekar sebagai Fasilitator Relasional dalam Pemberdayaan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama kader Motekar terletak pada kemampuannya membangun relasi sosial dan kepercayaan dengan masyarakat. Proses pendampingan tidak diawali dengan pendekatan formal-administratif, tetapi melalui interaksi informal yang berlangsung dalam ruang-ruang sosial masyarakat, seperti Posyandu, kegiatan PKK, majelis taklim, dan kegiatan lingkungan. Kehadiran Motekar dalam ruang sosial tersebut memungkinkan terbentuknya kedekatan emosional dan legitimasi sosial sebelum kader masuk pada persoalan keluarga yang lebih sensitif.

Salah satu informan menyatakan, “Saat di tempat yang baru, saya harus sosialisasi kembali dan memperkenalkan diri sebagai Motekar kepada aparat setempat dan warga” (M1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pengenalan diri dan sosialisasi awal menjadi langkah penting dalam membangun penerimaan masyarakat. Informan yang sama juga menegaskan bahwa pendekatan terhadap keluarga tidak dapat dilakukan secara langsung pada masalah inti, tetapi harus diawali dengan proses membangun kedekatan: “Awalnya memang tidak langsung masuk ke masalah keluarga, tapi kenalan dulu, ikut kegiatan warga supaya

mereka percaya” (M1). Hal ini diperkuat oleh hasil FGD yang menyebutkan bahwa Motekar biasanya memulai kegiatan dengan pendataan, kemudian aktif mengikuti kegiatan warga agar lebih dekat dengan masyarakat (FGD–Peserta 2).

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa Motekar secara aktif hadir dalam kegiatan Posyandu, berinteraksi dengan ibu-ibu, kader lokal, serta aparat lingkungan. Interaksi dilakukan melalui percakapan santai mengenai kondisi anak, kesehatan keluarga, aktivitas sehari-hari, dan persoalan rumah tangga yang muncul secara alami dalam percakapan. Dalam beberapa kegiatan, Motekar juga terlihat mencatat informasi penting secara informal dan membangun komunikasi berulang dengan individu yang sama pada pertemuan berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah keluarga tidak dilakukan melalui prosedur administratif semata, tetapi melalui proses sosial yang bertahap dan berbasis kepercayaan.

Dengan demikian, Motekar menjalankan peran sebagai fasilitator relasional yang mengandalkan kedekatan sosial, komunikasi interpersonal, dan kepercayaan warga sebagai pintu masuk pemberdayaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tahap awal pendampingan keluarga rentan sangat ditentukan oleh kemampuan kader dalam membangun *trust building*. Namun, kekuatan relasional ini masih cenderung bergantung pada kapasitas personal kader dan belum sepenuhnya terformalisasi dalam strategi relasi komunitas yang terstruktur.

b. Kompetensi Edukatif dalam Membangun Kesadaran Keluarga

Tema kedua menunjukkan bahwa Motekar memiliki kompetensi edukatif yang cukup menonjol dalam membangun kesadaran keluarga. Kompetensi ini tampak dalam kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, percakapan informal, serta pendampingan individual kepada keluarga binaan. Materi edukasi yang diberikan mencakup isu legalitas keluarga, pentingnya dokumen administrasi seperti akta nikah dan akta kelahiran, pengasuhan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko pernikahan dini.

Dalam proses edukasi, Motekar menggunakan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan pengalaman sehari-hari agar pesan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu informan menyatakan, “Kalau masyarakatnya terbuka, ibu pancing terus supaya komunikatif” (M1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Motekar berupaya membangun komunikasi dua arah, bukan hanya menyampaikan informasi secara satu arah. Dalam FGD, peserta juga menyebut bahwa Motekar “enak bisa nyambung sama warga, jadi tidak kaku” (FGD–Peserta 4), dan “cara penyampaiannya sederhana, jadi mudah dipahami” (FGD–Peserta 2). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif Motekar bersifat komunikatif, fleksibel, dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan di Posyandu, Motekar mengaitkan materi dengan pengalaman keseharian peserta, seperti praktik pengasuhan anak, pentingnya dokumen keluarga, dan dampak pernikahan dini. Motekar juga tidak mendominasi diskusi, tetapi memberi ruang kepada warga untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan menanggapi kasus yang dibahas. Dalam konteks ini, pembelajaran masyarakat berlangsung secara partisipatif dan dialogis.

Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa proses edukasi belum didukung oleh modul pembelajaran baku, kurikulum fasilitasi, atau perangkat pedagogis yang terstandar. Pembelajaran masih berlangsung secara fleksibel dan situasional sesuai pengalaman kader di lapangan. Dengan demikian, kompetensi edukatif Motekar telah berkembang pada level praktik, tetapi belum sepenuhnya terstruktur dalam sistem pembelajaran masyarakat yang

berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun modul fasilitasi keluarga rentan yang dapat digunakan sebagai panduan kader dalam menyampaikan materi secara lebih sistematis.

c. Kesenjangan Kompetensi Strategis dan Kelembagaan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Motekar memiliki kekuatan pada aspek relasional dan edukatif, masih terdapat kesenjangan pada kompetensi strategis dan kelembagaan. Kesenjangan tersebut terlihat pada belum adanya modul baku, sistem kaderisasi yang terstruktur, pelatihan lanjutan yang rutin, perencanaan berbasis data, dokumentasi inovasi, serta mekanisme advokasi yang terlembaga.

Salah satu informan menyatakan, “Kita tidak menyeleksi Motekar sejak 2015, jadi kualitasnya berbeda-beda” (M1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan standardisasi kapasitas kader belum berjalan secara optimal. Informan juga menyebut bahwa jumlah kader masih terbatas dibandingkan jumlah keluarga yang harus didampingi, serta belum ada pelatihan lanjutan yang dilakukan secara rutin. Dalam FGD, peserta menyampaikan bahwa “jumlah Motekar masih kurang untuk menjangkau semua warga” (FGD–Peserta 5) dan “kadang satu Motekar harus menangani banyak kasus sekaligus” (FGD–Peserta 2). Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan rasio kader dengan wilayah dampingan yang dapat memengaruhi kualitas pendampingan.

Observasi lapangan memperkuat temuan tersebut. Dalam satu kegiatan komunitas, terlihat bahwa jumlah peserta cukup banyak, sementara fasilitasi hanya dilakukan oleh satu kader Motekar. Situasi ini membatasi ruang interaksi individual, pendalaman kasus, serta pendampingan keluarga secara lebih intensif. Selain itu, tidak ditemukan adanya sistem kaderisasi atau mekanisme pelatihan berkelanjutan yang tampak dalam kegiatan lapangan. Proses fasilitasi lebih banyak bertumpu pada pengalaman pribadi kader dan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi.

Kesenjangan juga terlihat pada aspek perencanaan dan advokasi. Motekar telah melakukan pendampingan kasus, koordinasi dengan RT/RW, PKK, Posyandu, dan pemangku kepentingan terkait, tetapi praktik tersebut masih bersifat kasuistik dan belum terintegrasi dalam sistem layanan yang kuat. Advokasi terhadap keluarga rentan masih banyak dilakukan pada level individual, belum berkembang menjadi advokasi kolektif yang mampu memperkuat posisi tawar masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan strategis dan kelembagaan menjadi tantangan utama dalam profesionalisasi peran Motekar sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Untuk memperjelas pola kompetensi dan kesenjangan tersebut, unit kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat kemudian diringkas ke dalam empat klaster analitis pada Tabel 2.

Tabel 2. Klaster Kompetensi Kader Motekar sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Klaster Kompetensi	Kompetensi FPM Dominan	Temuan Lapangan	Kesenjangan
Relasional-sosial	Membangun relasi, jejaring, solidaritas	Kuat dalam komunikasi informal, kehadiran dalam kegiatan warga, dan	Belum berkembang menjadi sistem kontrol

Klaster Kompetensi	Kompetensi FPM Dominan	Temuan Lapangan	Kesenjangan
		pembentukan kepercayaan masyarakat	sosial kolektif yang terstruktur
Edukatif-transformasional	Edukasi, pembelajaran masyarakat, peningkatan kesadaran	Kuat dalam penyuluhan keluarga, pengasuhan, legalitas keluarga, dan diskusi partisipatif	Belum berbasis modul, kurikulum, atau perangkat pembelajaran yang terstandar
Teknis-inovatif	Perencanaan, inovasi, pemanfaatan sumber daya lokal	Adaptif terhadap kasus keluarga dan mampu memanfaatkan Posyandu, PKK, serta jaringan lokal	Belum berbasis data, belum terdokumentasi, dan belum memiliki mekanisme replikasi program
Struktural-advokatif	Advokasi, mediasi, kelembagaan, dan penguatan jejaring	Ada koordinasi dengan RT/RW, PKK, Posyandu, DP3AKB, dan aktor lokal lainnya	Masih kasuistik, belum terlembaga, dan belum menjadi sistem advokasi kolektif

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kompetensi Motekar paling kuat berada pada klaster relasional-sosial dan edukatif-transformasional. Kedua klaster ini tampak dalam kemampuan kader membangun kedekatan, memfasilitasi komunikasi, menyampaikan edukasi, serta mendorong kesadaran keluarga. Sementara itu, klaster teknis-inovatif dan struktural-advokatif masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Kader telah mampu merespons kasus secara adaptif, tetapi belum memiliki sistem perencanaan berbasis data, dokumentasi inovasi, serta mekanisme advokasi dan kelembagaan yang terstruktur.

d. Kontribusi Motekar terhadap Ketahanan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Motekar terhadap ketahanan keluarga paling kuat terlihat pada dimensi sosial-psikologis dan legalitas keluarga. Kontribusi ini muncul melalui edukasi, pendampingan, mediasi, serta penguatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya administrasi keluarga, pengasuhan anak, dan penyelesaian masalah secara lebih reflektif. Motekar membantu keluarga memahami pentingnya dokumen resmi, seperti akta nikah dan akta kelahiran, sekaligus memberikan pemahaman mengenai dampaknya terhadap perlindungan anak dan akses layanan sosial.

Salah satu informan menyatakan, "Ibu edukasi untuk pembuatan legalitas keluarga dan pentingnya dokumen resmi" (M1). Informan juga menegaskan bahwa banyak keluarga belum memahami pentingnya akta nikah bagi masa depan anak, sehingga penjelasan harus dilakukan secara perlahan agar keluarga memahami dampaknya. Dalam FGD, peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan Motekar, mereka menjadi lebih mengetahui pentingnya akta nikah dan akta kelahiran (FGD–Peserta 1). Peserta lain menyebut bahwa sebelumnya mereka tidak terlalu memperhatikan persoalan pengasuhan, tetapi setelah mengikuti kegiatan, mereka menjadi lebih sadar tentang pentingnya pola asuh anak (FGD–Peserta 3).

Observasi lapangan menunjukkan adanya diskusi aktif antarwarga setelah sesi penyuluhan, terutama mengenai pola asuh anak dan administrasi keluarga. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai prosedur pembuatan dokumen keluarga. Selain itu, terdapat perubahan dalam cara peserta membicarakan pengasuhan, dari yang semula bersifat normatif menjadi lebih reflektif dan berbasis pertimbangan dampak terhadap anak.

Namun demikian, kontribusi Motekar terhadap dimensi ekonomi keluarga belum terlihat signifikan. Pendampingan yang dilakukan lebih banyak menyentuh aspek kesadaran, legalitas, komunikasi, relasi keluarga, dan akses terhadap layanan sosial. Dimensi ekonomi, seperti penguatan usaha keluarga, akses permodalan, keterampilan kerja, atau peningkatan pendapatan, belum menjadi bagian utama dari praktik pendampingan yang teramati. Dengan demikian, kontribusi Motekar dapat dipahami sebagai bentuk *early-stage empowerment*, yaitu pemberdayaan tahap awal yang memperkuat kesadaran, pengetahuan, sikap, dan akses administratif keluarga, tetapi belum sepenuhnya menyentuh transformasi ekonomi keluarga secara struktural.

e. Motekar sebagai Agen Perubahan Komunitas

Hasil lain menunjukkan bahwa Motekar berperan sebagai agen perubahan komunitas yang mendorong perubahan secara gradual, dialogis, dan berbasis partisipasi. Perubahan yang difasilitasi oleh Motekar tidak berlangsung secara instan atau melalui pendekatan instruktif, tetapi melalui proses komunikasi berulang, penguatan kesadaran, dan pendampingan yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat.

Salah satu informan menyatakan, “Ibu harus mengenali karakter masyarakat supaya bisa masuk” (M1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan fasilitasi sangat bergantung pada kemampuan kader membaca situasi sosial dan menyesuaikan pendekatan dengan karakter warga. Informan yang sama juga menegaskan, “Kita tidak bisa memaksa, tapi mengajak pelan-pelan” dan “Perubahan itu butuh proses, tidak bisa langsung” (M1). Pandangan ini sejalan dengan pernyataan peserta FGD yang menyebut bahwa Motekar berperan “seperti penggerak di masyarakat” (FGD–Peserta 3), menjadi tempat bertanya ketika ada masalah keluarga (FGD–Peserta 2), serta membantu memberi arah tanpa mengambil alih keputusan warga (FGD–Peserta 5).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan komunitas, Motekar aktif memfasilitasi diskusi, mengarahkan percakapan, dan memberikan alternatif solusi tanpa mendominasi proses. Warga terlihat responsif, terlibat dalam diskusi, serta saling berbagi pengalaman. Pola ini memperlihatkan bahwa Motekar menjalankan peran sebagai fasilitator transformasional yang mendorong masyarakat untuk berpikir, merefleksikan masalah, dan mengambil keputusan secara mandiri.

Meskipun demikian, peran Motekar sebagai agen perubahan masih lebih kuat pada level interpersonal dan kelompok kecil. Perubahan yang terjadi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem sosial komunitas. Belum terlihat adanya mekanisme komunitas yang secara berkelanjutan melanjutkan proses pemberdayaan tanpa ketergantungan pada figur Motekar. Dengan kata lain, peran Motekar sebagai agen perubahan telah berhasil membangun kesadaran dan partisipasi, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi gerakan kolektif atau sistem pemberdayaan komunitas yang mandiri dan terlembaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh Motekar memiliki kekuatan pada aspek relasional, edukatif, dan partisipatif. Motekar mampu membangun kepercayaan, menyampaikan edukasi keluarga, memfasilitasi

diskusi, serta mendorong perubahan kesadaran warga. Namun, praktik tersebut masih menghadapi keterbatasan pada aspek strategis, teknis, dan kelembagaan, terutama terkait standardisasi kompetensi, pelatihan lanjutan, kaderisasi, perencanaan berbasis data, advokasi kolektif, dan penguatan kelembagaan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas Motekar tidak cukup dilakukan pada level individu kader, tetapi perlu didukung oleh sistem pelatihan, supervisi, jejaring kelembagaan, dan kebijakan pemberdayaan keluarga yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) memiliki posisi strategis dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui praktik pemberdayaan berbasis komunitas. Temuan yang diperoleh melalui triangulasi wawancara, FGD, dan observasi memperlihatkan bahwa Motekar tidak hanya menjalankan tugas administratif program, tetapi juga membangun relasi sosial, memfasilitasi pembelajaran keluarga, menjembatani akses terhadap sumber daya lokal, serta mendorong perubahan perilaku keluarga rentan secara bertahap. Dalam kerangka *community development*, peran ini menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga tidak dapat dilepaskan dari proses sosial yang hidup di tingkat komunitas. Pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian program dari atas ke bawah, tetapi membutuhkan aktor lokal yang mampu memahami konteks sosial, membangun kepercayaan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Dushkova & Ivlieva, 2024) bahwa program pemberdayaan komunitas membutuhkan peningkatan kapasitas, kepemilikan lokal, dukungan sosial, kepemimpinan partisipatif, dan integrasi sumber daya komunitas agar dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan (Ahmed et al., 2025; Cheng et al., 2024b; Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024)

Pertama, temuan penelitian menegaskan bahwa Motekar berperan sebagai agen pemberdayaan berbasis komunitas. Peran ini tampak dari kemampuan kader membangun kedekatan sosial dengan keluarga dan warga melalui ruang-ruang sosial yang telah dikenal masyarakat, seperti Posyandu, kegiatan PKK, majelis taklim, dan forum lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, kader tidak langsung masuk pada persoalan keluarga yang sensitif, tetapi memulai proses pendampingan melalui pengenalan, komunikasi informal, dan kehadiran berulang dalam kegiatan warga. Temuan FGD juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah terbuka setelah merasa mengenal dan percaya kepada Motekar, sedangkan observasi memperlihatkan bahwa kader membangun komunikasi santai dengan ibu-ibu, kader lokal, dan aparat lingkungan. Pola ini menunjukkan bahwa Motekar bekerja sebagai aktor lokal yang membangun legitimasi sosial sebelum melakukan intervensi pemberdayaan. Dalam konteks ini, Motekar dapat dipahami sebagai *community-based change agent* yang menghubungkan keluarga rentan dengan gagasan perubahan, sumber daya lokal, serta jejaring dukungan sosial (Ahmed et al., 2025; Dushkova & Ivlieva, 2024; Rahma et al., 2023; Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024)

Peran Motekar sebagai agen pemberdayaan juga terlihat dalam kemampuannya membangun kesadaran, partisipasi, dan kemandirian keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Motekar tidak memosisikan keluarga rentan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek yang didorong untuk memahami masalah dan mengambil keputusan. Dalam

kegiatan edukasi, kader menggunakan bahasa sederhana, contoh konkret, dan pengalaman sehari-hari agar keluarga dapat menghubungkan materi dengan realitas kehidupan mereka. Pola ini selaras dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan proses penyadaran kritis dan penguatan kapasitas masyarakat. (Freire, 1970) menegaskan bahwa pemberdayaan menuntut proses dialog, refleksi, dan aksi agar masyarakat mampu membaca realitas sosialnya secara kritis. Temuan observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung dialogis, tidak kaku, dan memberi ruang bagi warga untuk bertanya maupun berbagi pengalaman. Pola ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan penguatan kapasitas, partisipasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Studi terbaru tentang pemberdayaan komunitas dan fasilitasi implementasi menunjukkan bahwa perubahan perilaku lebih mungkin terjadi ketika fasilitator mampu membangun keterlibatan, menumbuhkan efikasi diri, dan mengintegrasikan proses belajar ke dalam rutinitas sosial masyarakat (Ahmed et al., 2025; Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Heuser et al., 2024; Suparit et al., 2023)

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga merupakan basis penting dalam pembangunan masyarakat. Keluarga rentan yang didampingi Motekar bukan sekadar penerima layanan, melainkan bagian dari proses pembangunan sosial yang lebih luas. Ketika keluarga memperoleh pengetahuan mengenai administrasi keluarga, pengasuhan, relasi keluarga, pencegahan kekerasan, dan akses layanan sosial, kapasitas keluarga untuk berfungsi secara lebih baik ikut meningkat. Temuan wawancara menunjukkan bahwa Motekar banyak memberikan edukasi mengenai pentingnya akta nikah dan akta kelahiran, sementara FGD memperlihatkan bahwa warga menjadi lebih sadar terhadap pentingnya legalitas keluarga dan pola asuh anak. Observasi juga menunjukkan adanya diskusi aktif antarwarga setelah penyuluhan, terutama mengenai prosedur dokumen keluarga dan praktik pengasuhan. Dengan demikian, pemberdayaan keluarga tidak hanya menghasilkan perubahan pengetahuan individual, tetapi juga mendorong tumbuhnya percakapan sosial baru di komunitas. Temuan ini relevan dengan literatur ketahanan keluarga yang menempatkan dukungan sosial, komunikasi keluarga, dan akses sumber daya sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas keluarga menghadapi tekanan (Cheng et al., 2024a)(Heuser et al., 2024)(Suparit et al., 2023)(Tan et al., 2024)(Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024).

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai fondasi ketahanan komunitas karena keluarga merupakan unit sosial terkecil yang membentuk kualitas kehidupan masyarakat. (Walsh, 2006) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit ketika menghadapi tekanan melalui pola keyakinan, komunikasi, organisasi keluarga, serta mobilisasi sumber daya. (Sunarti, 2013) menekankan bahwa ketahanan keluarga mencakup dimensi fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berhubungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Motekar paling kuat berada pada dimensi sosial-psikologis dan legalitas keluarga. Kader membantu keluarga memahami persoalan, memperkuat komunikasi, meningkatkan kesadaran pengasuhan, serta mengakses dokumen administrasi yang penting bagi perlindungan keluarga dan anak. Dalam perspektif pembangunan ketahanan keluarga, kontribusi ini penting karena keluarga yang memiliki pengetahuan, dukungan sosial, dan akses layanan akan lebih mampu menghadapi tekanan sosial maupun ekonomi. Studi (Cheng et al., 2024b) menunjukkan bahwa ketahanan keluarga berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, sedangkan (Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024) menegaskan bahwa dukungan sosial dan ketahanan keluarga dapat memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi beban pengasuhan. Hal serupa ditunjukkan oleh (Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024), bahwa

ketahanan keluarga dan komunitas terbentuk melalui relasi, dukungan sosial, dan sumber daya komunitas (Cheng et al., 2024a; Heuser et al., 2024; Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024)

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi Motekar terhadap dimensi ekonomi keluarga masih terbatas. Praktik pendampingan lebih dominan pada penguatan kesadaran, legalitas, pengasuhan, komunikasi, dan akses layanan sosial. Dimensi ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, pengembangan usaha keluarga, akses permodalan, atau keterampilan kerja, belum menjadi fokus utama dalam kegiatan yang teramati. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Motekar masih berada pada tahap awal, yaitu membangun kesadaran dan kapasitas dasar keluarga. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kondisi ini penting tetapi belum cukup. Pembangunan ketahanan keluarga membutuhkan pendekatan yang lebih integratif, yakni menghubungkan penguatan sosial-psikologis dengan penguatan ekonomi, jejaring layanan, dan dukungan kelembagaan. Literatur terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dan komunitas akan lebih berdampak apabila menggabungkan dukungan psikososial, penguatan ekonomi, akses sumber daya, partisipasi kolektif, dan mekanisme evaluasi keberlanjutan (Dushkova & Ivlieva, 2024; Dvalishvili et al., 2022; Rahma et al., 2023; Suparit et al., 2023; Tan et al., 2024)

Ketiga, temuan penelitian memperlihatkan bahwa relasi sosial merupakan modal utama dalam praktik pemberdayaan keluarga oleh Motekar. Kekuatan paling menonjol dari kader berada pada kompetensi relasional-sosial, yaitu kemampuan membangun kedekatan, kepercayaan, komunikasi informal, dan jejaring dengan aktor lokal. Dalam perspektif *community development*, relasi sosial bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi merupakan modal sosial yang memungkinkan terbentuknya partisipasi, solidaritas, dan tindakan kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan warga kepada Motekar menjadi prasyarat agar keluarga bersedia membuka persoalan yang bersifat privat, seperti konflik keluarga, kekerasan, atau masalah legalitas. Tanpa kepercayaan, proses identifikasi masalah dan pendampingan keluarga sulit berjalan secara efektif. Kajian mutakhir tentang ketahanan keluarga dan komunitas menegaskan bahwa hubungan sosial, dukungan komunitas, kepercayaan, serta jejaring lokal merupakan faktor penting dalam membantu keluarga menghadapi situasi sulit dan membangun daya lenting kolektif (Cleek et al., 2012; Dushkova & Ivlieva, 2024; Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024; Zhang et al., 2024) Kehadiran Motekar dalam kegiatan Posyandu, PKK, majelis taklim, dan forum warga menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga berlangsung melalui ruang sosial yang sudah dimiliki masyarakat. Hal ini penting karena pemberdayaan yang berakar pada ruang sosial lokal cenderung lebih mudah diterima dibanding intervensi yang datang secara formal dan berjarak. Temuan observasi menunjukkan bahwa kader menggunakan percakapan santai untuk mengenali kondisi keluarga, menanyakan kesehatan anak, dan membangun komunikasi berulang. Dalam FGD, peserta menilai bahwa Motekar tidak kaku dan mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan warga. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi informal menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif. Dalam konteks dakwah pembangunan dan pengembangan masyarakat Islam, ruang sosial seperti majelis taklim, Posyandu, dan forum warga dapat dikembangkan sebagai media edukasi keluarga, penguatan solidaritas sosial, dan pembangunan ketahanan komunitas. Studi tentang komunitas dan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa ruang sosial lokal dapat menjadi medium pembentukan dukungan sosial, pertukaran pengetahuan, partisipasi, serta penguatan kapasitas komunitas (Ahmed et al., 2025; Dushkova & Ivlieva, 2024; Laila & License, 2025; Tan et al., 2024)

Meskipun demikian, modal sosial yang dibangun Motekar masih dominan pada level interpersonal dan belum berkembang menjadi sistem kontrol sosial kolektif yang terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jejaring dengan RT/RW, PKK, Posyandu, dan DP3AKB sudah ada, tetapi masih bersifat informal dan kasus per kasus. Artinya, relasi sosial telah menjadi kekuatan, tetapi belum sepenuhnya terlembaga sebagai mekanisme pemberdayaan komunitas. Hal ini penting dicermati karena pemberdayaan tidak hanya bertujuan mengubah individu, tetapi juga membangun solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan keberdayaan komunitas. Majelis taklim, Posyandu, dan forum warga sebenarnya dapat dikembangkan sebagai ruang edukasi keluarga dan penguatan ketahanan komunitas. Namun, agar ruang tersebut berfungsi sistematis, diperlukan desain program, kaderisasi, dan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Literatur pemberdayaan komunitas menunjukkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan pelembagaan partisipasi, kepemimpinan lokal, sistem koordinasi, serta dukungan lintas aktor (Ahmed et al., 2025; Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Laila & License, 2025; Tan et al., 2024)

Keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan kompetensi Motekar harus dipahami sebagai masalah kelembagaan, bukan semata kelemahan individu kader. Triangulasi data menunjukkan bahwa kader memiliki kemampuan relasional dan edukatif yang cukup kuat, tetapi menghadapi keterbatasan pada aspek strategis dan struktural. Wawancara menunjukkan bahwa pelatihan lanjutan belum rutin, jumlah kader terbatas, dan kualitas kader tidak merata. FGD memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa satu kader sering menangani banyak kasus, sementara observasi menunjukkan bahwa dalam kegiatan komunitas jumlah peserta cukup banyak, tetapi hanya difasilitasi oleh satu Motekar. Selain itu, belum terlihat adanya modul baku, sistem kaderisasi, supervisi terstruktur, atau perencanaan berbasis data. Kondisi ini menunjukkan pentingnya transformasi dari pemberdayaan berbasis figur menuju pemberdayaan berbasis sistem komunitas. Studi terbaru menegaskan bahwa kapasitas fasilitator perlu didukung pelatihan berkelanjutan, supervisi, integrasi organisasi, jejaring kelembagaan, serta mekanisme evaluasi agar praktik pemberdayaan tidak bergantung pada kapasitas individual semata (Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Purnama & Andriani, 2022; Rahma et al., 2023; Tan et al., 2024)

Kesenjangan kelembagaan juga terlihat pada belum optimalnya advokasi kolektif. Motekar telah melakukan advokasi dan mediasi, tetapi praktik tersebut masih cenderung kasuistik. Advokasi lebih banyak diarahkan pada penyelesaian masalah individual keluarga dan belum berkembang menjadi gerakan komunitas untuk memperkuat posisi tawar keluarga rentan. Padahal, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, advokasi merupakan bagian penting dari transformasi sosial karena berkaitan dengan akses, keadilan, dan perubahan struktur yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, aspek partisipasi, jejaring, kepemimpinan lokal, dan kapasitas organisasi mulai tampak, tetapi belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, strategi penguatan Motekar perlu diarahkan pada pengembangan sistem rujukan, forum koordinasi lintas lembaga, modul edukasi keluarga, pendataan keluarga rentan, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator ketahanan keluarga. Rekomendasi ini konsisten dengan kajian terbaru yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, pelatihan fasilitator, dan desain program berbasis komunitas dalam memperkuat keberlanjutan pemberdayaan (Ahmed et al., 2025; Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Tan et al., 2024; Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, 2024)

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Motekar telah menjalankan peran substantif sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan agen perubahan komunitas.

Kekuatan utama Motekar terletak pada kompetensi relasional-sosial dan edukatif-transformasional, terutama dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi komunikasi, menyampaikan edukasi, dan mendorong kesadaran keluarga. Namun, temuan juga menunjukkan adanya kesenjangan pada kompetensi teknis-inovatif dan struktural-advokatif, terutama dalam perencanaan berbasis data, dokumentasi inovasi, advokasi kolektif, kaderisasi, supervisi, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, pembangunan ketahanan keluarga melalui Motekar membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memperkuat kapasitas individu kader, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan keluarga berbasis komunitas. Ekosistem tersebut perlu mencakup pelatihan berkelanjutan, standar kompetensi, jejaring lintas lembaga, forum keluarga, kelas keluarga, dan mekanisme rujukan sosial. Melalui strategi tersebut, keluarga rentan tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan sosial yang mendorong kemandirian, solidaritas, dan ketahanan komunitas secara berkelanjutan (Ahmed et al., 2025; Cheng et al., 2024b; Costea et al., 2024; Dushkova & Ivlieva, 2024; Tan et al., 2024).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) telah menjalankan peran substantif sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan agen perubahan berbasis komunitas. Melalui pelaksanaan tugas mengidentifikasi, memotivasi, memediasi, mendidik, merencanakan, mengadvokasi, dan melaporkan, Motekar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor lokal yang membangun kesadaran, partisipasi, dan kemandirian keluarga rentan. Integrasi data wawancara, FGD, dan observasi memperlihatkan bahwa kekuatan utama Motekar terletak pada pendekatan relasional-sosial dan edukatif-transformasional, terutama dalam membangun kepercayaan, melakukan komunikasi informal, memfasilitasi pembelajaran keluarga, serta mendorong perubahan perilaku secara gradual dan kontekstual.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pemberdayaan keluarga merupakan basis penting dalam pembangunan ketahanan masyarakat. Pendampingan Motekar berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga, khususnya pada dimensi sosial-psikologis, legalitas keluarga, kesadaran pengasuhan, dan akses terhadap layanan sosial. Namun demikian, kontribusi terhadap dimensi ekonomi dan transformasi struktural komunitas masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga rentan belum cukup diposisikan hanya sebagai penerima layanan, tetapi perlu dikembangkan sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan kolektif dan pembangunan sosial berbasis komunitas.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara praktik Motekar di lapangan dengan standar kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan tersebut terutama tampak pada kompetensi teknis-inovatif dan struktural-advokatif, seperti perencanaan berbasis data, penggunaan modul baku, kaderisasi, supervisi, advokasi kolektif, penguatan kelembagaan, dan jejaring lintas lembaga. Oleh karena itu, penguatan Motekar tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas individu kader, tetapi perlu didukung oleh sistem pelatihan berbasis kompetensi, mentoring berkelanjutan, modul fasilitasi keluarga rentan, kaderisasi lokal, serta pengembangan forum pemberdayaan kolektif. Dengan demikian, Motekar dapat berkembang dari pendamping keluarga menjadi penggerak komunitas dalam pembangunan ketahanan keluarga yang lebih terlembaga, partisipatif, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan peran Motekar perlu diarahkan pada strategi yang lebih operasional, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan praktik pemberdayaan keluarga di tingkat komunitas. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun kurikulum pelatihan Motekar berbasis kompetensi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Kurikulum ini perlu memprioritaskan kompetensi perencanaan partisipatif, pemetaan masalah keluarga, mediasi konflik, advokasi kolektif, pengelolaan pembelajaran masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal. Pelatihan juga perlu dilengkapi dengan indikator capaian kompetensi sehingga perkembangan kapasitas kader motekar tersebut dapat diukur secara berkala.

Kedua, DP3AKB perlu mengembangkan sistem supervisi dan mentoring kader secara berkelanjutan, bukan hanya pelatihan satu kali. Supervisi dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, klinik kasus, refleksi praktik lapangan, pendampingan oleh fasilitator senior, serta evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Sistem ini penting agar kader memperoleh ruang untuk mendiskusikan kendala, memperbaiki strategi pendampingan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada keluarga rentan.

Ketiga, Modul Motekar perlu dikuatkan khususnya dalam memfasilitasi keluarga rentan yang mudah digunakan dalam kegiatan lapangan, diantaranya memuat materi layanan legalitas keluarga, pengasuhan anak, komunikasi keluarga, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan pernikahan dini, literasi layanan sosial, serta rujukan kepada lembaga terkait. Modul ini juga dapat menjadi standar minimum agar praktik edukasi tidak hanya bergantung pada pengalaman personal kader.

Keempat, perlu dibangun sistem kaderisasi lokal melalui kolaborasi dengan PKK, Posyandu, majelis taklim, RT/RW, tokoh masyarakat, dan lembaga komunitas. Kaderisasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan program dan memperluas jangkauan pendampingan. Kelima, program Motekar perlu diperluas dari pendampingan individual menuju pemberdayaan kolektif, seperti kelompok dukungan keluarga, kelas keluarga, forum warga peduli ketahanan keluarga, serta mekanisme rujukan lintas lembaga. Dengan strategi tersebut, Motekar dapat berkembang sebagai penggerak komunitas dalam pembangunan ketahanan keluarga yang lebih terlembaga dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, M. K., El Massaoudi, C. A., Biri, L., Mezzaoui, Y. E., Mazoz, B., Andrews, L. R., Herne, T., Coots, S., Rubinstein, R. A., & Lane, S. D. (2025). Using a community-based cultural approach to promote life skills and leadership for social determinants of health in adolescents from disadvantaged communities in Casablanca, Morocco: a Sidi Moumen community case study. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23971-y>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology*. *January 2013*, 37–41.
- Cheng, X., Feng, Y., An, Y., & Song, Y. (2024a). Archives of Psychiatric Nursing The association between family resilience and mental health: A three-level. *Archives of Psychiatric Nursing*, 53(122), 224–231. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2024.10.017>

- Cheng, X., Feng, Y., An, Y., & Song, Y. (2024b). The association between family resilience and mental health: A three-level meta-analysis. *Archives of Psychiatric Nursing*, 53, 224–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apnu.2024.10.017>
- Cleek, E. N., Psy, D., Wofsy, M., Boyd-franklin, N., Ph, D., & Howell, T. J. (2012). *The Family Empowerment Program : An Interdisciplinary Approach to Working with*. 51(2), 207–217.
- Costea, V., Bäck, A., Bergström, A., Lundin, A., Hasson, H., & Eriksson, L. (2024). *A longitudinal mixed methods evaluation of a facilitation training intervention to build implementation capacity*. September, 1–14. <https://doi.org/10.3389/frhs.2024.1408801>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). *Empowering Communities to Act for a Change : A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience*.
- Dvalishvili, D., Ssewamala, F. M., Nabunya, P., Sensoy Bahar, O., Kizito, S., Namuwonge, F., & Namatovu, P. (2022). Impact of Family-Based Economic Empowerment Intervention, Suubi+Adherence (2012–2018) on Multidimensional Poverty for Adolescents Living with HIV (ALWHIV) in Uganda. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114326>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Heuser, C., Schneider, J. N., Heier, L., Ernstmann, N., Nakata, H., Petermann-meyer, A., Bremen, R., Karger, A., Icks, A., & Brümmendorf, T. H. (2024). *Family resilience of families with parental cancer and minor children : a qualitative analysis*. January. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1251049>
- Jim Ife. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Cambridge Books.
- Laila, A. N., & License, C. C. (2025). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Social Capital as a Catalyst for Community Empowerment : Evidence from KWT Srikandi Mrican , Indonesia Social Capital as a Catalyst for Community Empowerment : Evidence from KWT Srikandi Mrican , Indonesia*. <https://doi.org/10.14421/jpm.2025.091-02>
- Laverack, G. (2006). (2006). Improving health outcomes through community empowerment: A review of the literature. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 24(1), 113–120.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Kepmenakertrans No. 81*, (2012) (testimony of SKKNI No.81).
- Pan, B., Gong, Y., Wang, Y., Miao, J., Zhao, C., & Li, Y. (2025). The impact of maternal parenting stress on early childhood development: the mediating role of maternal depression and the moderating effect of family resilience. *BMC Psychology*. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02575-6>

- Parsons, R. J., Jorgensen, J. D., & Hernandez, S. H. (1994). *The integration of social work practice*. Brooks/Cole.
- Purnama, R., & Andriani, M. (2022). *EFEKTIVITAS PROGRAM MOTEKAR (MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2021*. 7(4).
- Rahma et al. (2023). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 413–427.
- Rogers, E. M. (2003). *D. of innovations* (5th ed.). F. P. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sunarti, E. (2001). *Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: Telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan*.
- Sunarti, E. (2013). *Ketahanan keluarga*. IPB Press.
- Suparit, S., Sakunpong, N., & Junprasert, T. (2023). Heliyon Family resilience processes among guardians caring for children and youths with leukemia. *Heliyon*, 9(6), e17205. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17205>
- Tan, Y., Pinder, D., Bayoumi, I., Carter, R., Cole, M., Jackson, L., Watson, A., Knox, B., Nguyen, S. C., Ford, M., & Davison, C. M. (2024). Family and community resilience : a Photovoice study. *International Journal for Equity in Health*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02142-2>
- Walsh, F. (2006). *Strengthening family resilience* (2nd ed.). Guilford Press.
- Xu, Q., Zhang, X., Wang, Y., & Li, J. (2024). Family resilience and social support as mediators of caregiver burden and capacity in stroke caregivers : a cross-sectional study. *Frontiers in Psychology*, 15, Article (December), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1435867>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zhang, Y., Hu, Y., & Yang, M. (2024). The relationship between family communication and family resilience in Chinese parents of depressed adolescents : a serial multiple mediation of social support and psychological resilience. *BMC Psychology*, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01514-7>